

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: MKRI.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Friedman, L. M. (2017). *American law: An introduction*. New York: Oxford University Press.
- Hakim, L. (2019). *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Kencana.
- Khallaf, A. W. (1996). *Ilmu ushul fiqh*. Dar al-Qalam.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mertha, I. K., dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Zuhaili, W. al-. (1985). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu (Vol. 8)*. Beirut: Dār al-Fikr.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Laporan dan Dokumen Resmi Pemerintah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*. Blitar: DLH, 2023.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. *Laporan Pengelolaan Sampah Perkotaan Tahun 2023*. Surabaya: DLH, 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Profil Kabupaten Blitar Tahun 2024*. Diakses melalui <https://sipsn.menlhk.go.id>

Skripsi/Tesis

Elmayanti. (2012). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Tesis, Universitas Andalas).

Juariya, S. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah* (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember).

Radika, W. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah* (Skripsi Sarjana, Universitas Borneo Tarakan).

Sitepu, M. R. B. (2018). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Dispensasi Lokasi Di Kota Binjai* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Sudaryanto, E. (2017). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Bosowa).

Widianto, Y. S. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Jurnal/Artikel

Ananda, M. A., & Handayani, W. (2024). Peran Penting Satpol PP Dalam Menegakkan Ketertiban Umum Kota Surabaya. *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 83–92.

Handayani, Wiwik & Putri, Melyka Ayu. *Analisis Penegakan Peraturan Daerah Tentang Kebersihan di Kota Semarang*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 2, No. 3, 2019.

Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam NKRI. *Ius Quia Iustum*, 26(2), 238–258.

Santoso, S. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi. *Refleksi Hukum*, 8(1), 1–18.

Internet/Website

GoodStats. (2024). Volume sampah RI bakal tembus 82 juta ton pada 2045. *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/volume-sampah-ri-bakal-tembus-82-juta-ton-pada-2045-HovWO>

Pemerintah Kabupaten Blitar. *Satpol PP Tegur PKL karena Langgar Aturan Kebersihan*. Diakses melalui portal resmi <https://blitarkab.go.id> , 12 Agustus 2024.

Radar Blitar. *Kesadaran PKL Soal Sampah Masih Rendah, DLH Blitar Akui Pembinaan Belum Maksimal*. 5 September 2024.